

STT No. 214/sk/Ditjend PPG/1998

ISSN : 1410 - 7457

AKADEMIKA

Jurnal Studi Keislaman

Volume 07, Nomor 1, September 2000



Bisri Affandi, Amiq, Bambang Subandi, Akhtim Wahyuni,
Shonhadji Sholeh, Masdar Hilmy, Richard W. Baker et.al.

Diterbitkan oleh :
Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

WANITA MUSLIM DAN POLITIK

STUDI TENTANG PARTISIPASI POLITIK WANITA MUSLIM DI SURABAYA

Akhtim Wahyuni¹

Abstrak: Terlepas dari kontroversi tentang peran wanita dalam politik, sejumlah wanita muslim di Surabaya mulai aktif di politik. Perkembangan ini seiring dengan bergulirnya reformasi yang berimplikasi pada munculnya berbagai partai Islam. Dampak dari keadaan ini adalah semakin terbukanya kran saluran politik wanita muslim seperti melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun saluran politik dimaksud beragam, tujuan yang hendak dicapai secara esensial sama, di samping ingin menunjukkan bahwa wanita mampu berkiprah di politik sebagaimana laki-laki, juga untuk meningkatkan peran dan kualitas wanita yang selama ini terpinggirkan. Bentuk partisipasi politik mereka paling nyata adalah keterlibatan secara berkesinambungan, baik dalam pemilihan umum sebagai juru kampanye maupun internal dan eksternal organisasi dengan cara menghadiri rapat, memberikan sumbangan baik materiil maupun immateriil kepada partai, hingga *lobbying* kepada elit pemerintah.

Kata Kunci: politik, partai Islam, wanita Muslim, Surabaya.

¹ Penulis adalah alumni Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Konsentrasi Pemikiran Islam.

Pendahuluan

Keterlibatan wanita secara aktif dalam kegiatan politik pernah menjadi polemik yang berkepanjangan di Indonesia. Sebagian kelompok menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, sedangkan sebagian yang lain menganggapnya melanggar norma agama dan kodrat wanita. Perdebatan semacam ini mengkristal pada saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang dipimpin seorang perempuan bernama Megawati, memimpin hasil perolehan suara pada pemilu 1999. Partai tersebut menetapkan satu konsensus dengan mencalonkan Megawati sebagai calon tunggal Presiden RI. Di sinilah polemik boleh tidaknya wanita memimpin negara meruncing dan menjadi tema besar dalam wacana perpolitikan masyarakat Indonesia.

Diskusi-diskusi, baik dalam skala besar maupun kecil, banyak digelar untuk membicarakan boleh tidaknya Mega menjadi presiden. Penggelar diskusi tersebut di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, PPP secara resmi menyatakan tidak akan memilih presiden wanita, dan sebaliknya, merekomendasikan bahwa presiden yang terbaik dan tepat untuk memimpin Indonesia haruslah putera terbaik bangsa, dan bukan puteri, yang beragama Islam. Menurut Hamzah Haz, selaku ketua partai, keputusan tadi telah menjadi fatwa ulama' PPP.² Demikian juga dengan PKB; di tubuh partai ini masih ada pandangan tidak setuju terhadap presiden wanita, padahal kenyataan menunjukkan bahwa Megawati melalui PDIP ternyata banyak didukung rakyat. Menanggapi kasus ini, Alwi Shihab menegaskan bahwa para kiai bukan tidak setuju terhadap Megawati, tetapi substansi masalahnya adalah status Megawati sebagai wanita.³ Ini menunjukkan betapa masih beragamnya pemikiran masyarakat Indonesia dalam memposisikan peran wanita.

Kesadaran politik wanita Indonesia, sebenarnya, bukan hal baru. Beberapa nama yang bisa disebut untuk membuktikan partisipasi politik mereka di antaranya Sultanah Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan Berdaulat yang dinobatkan memerintah Aceh pada tahun 1641-1675, Tribuwanatungga Dewi, Maria Walandaw Maramis, Rahmah el-Yunisiah

² Jawa Pos, (?), tanggal 16 Juni 1999, (?).

³ Ibid.

dan lain-lain.⁴ Organisasi-organisasi kebangsaan yang bersifat kooperatif seperti Budi Utomo (1908) maupun yang nonkooperatif seperti Partai Nasional Indonesia (1927) juga telah memberi pengaruh besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi keterlibatan wanita dalam perjuangan bangsa. Sejak saat itu, organisasi wanita bertumbuhan, salah satunya adalah Putri Mardika sebagai organisasi wanita pertama yang berdiri pada tahun 1912 di Jakarta. Setelah itu, muncul beberapa organisasi wanita lain semisal Keutamaan Istri di Tasikmalaya pada tahun 1913 dan Wanito Susilo di Palembang pada tahun 1918. Organisasi semacam tadi hanya bergerak di bidang politik saja.⁵

Perjuangan kaum wanita Indonesia tidak berhenti di situ. Sampai saat ini, sejumlah upaya perbaikan untuk memberdayakan wanita senantiasa dilakukan. Hasil nyata dari upaya tersebut adalah tampilnya sejumlah politisi wanita di pentas politik nasional. Kemenangan PDIP, organisasi politik yang saat itu dipimpin seorang wanita, pada pesta demokrasi 1999 adalah salah satu bukti terbukanya iklim politik bagi wanita Indonesia.

Kesempatan berpolitik ini juga tidak disia-siakan wanita muslim Indonesia. Munculnya multipartai direspon baik oleh mereka. Adanya beberapa partai politik yang berafiliasi kepada Islam dimanfaatkan oleh wanita muslim untuk terlibat di dalamnya sehingga tidak mengherankan jika pada saat ini dijumpai wanita muslim yang vokal menyuarakan keadilan bagi kaumnya lewat berbagai lembaga politik. Beberapa contoh di antaranya adalah Khofifah Indar Parawansa yang aktif di PKB dan saat ini menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan, Aisyah Aminah di PPP dan selama beberapa periode menjadi anggota DPR/MPR, Marwah Daud Ibrahim di Partai Golkar, Nurdianti Akma di Partai Amanat Nasional (PAN) dan pada periode 1999-2004 ini menjadi anggota DPR/MPR RI. Fenomena yang terjadi dan dilakukan oleh wanita muslim di tingkat pusat ini juga dilakukan oleh wanita muslim Surabaya. Melalui Dewan Pimpinan Wilayah, salah satunya, mereka mengekspresikan sikap politiknya. Sebagian, bahkan, duduk sebagai anggota legislatif DPRD Tingkat I Jawa Timur.

⁴ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, tt.), 2.

⁵ Ibid., 19.

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengungkap kondisi umum wanita muslim Surabaya yang aktif di PKB, PBB, PAN, dan PPP Tingkat Wilayah Jawa Timur, tujuan partisipasi mereka, faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan mereka, serta bentuk partisipasi mereka di partai politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan *research* pada empat partai politik tersebut di atas, dengan rincian masing-masing sebanyak delapan responden. Sumber data yang diperlukan dalam *research* ini meliputi data lapangan, berupa hasil wawancara dengan sejumlah politisi wanita muslim di empat partai tersebut, serta data kepustakaan yang berupa buku, jurnal, dan dokumen yang signifikan.

Pencarian data kuantitatif di lapangan dijamin dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data kualitatif dicari lewat observasi terbatas. Untuk menganalisis data kuantitatif yang telah terkumpul digunakan analisis kuantitatif, dengan cara memaksimalkan analisis tabel frekuensi yang dibantu dengan rumus prosentase. Analisis kualitatif juga dilakukan dengan cara menjelaskan berbagai hal yang mendukung analisis kuantitatif dan beragam gejala yang tidak dapat dijamin lewat kuesioner.

Hak Politik Wanita Muslim

Setiap makhluk hidup mendapatkan hak, kehormatan, dan individualitas yang hakiki. Dalam konteks penciptaan dan pembentukan, serangkaian hak dan kebebasan telah diberikan. Salah satu bukti yang dapat diandalkan dan dijadikan rujukan untuk mengetahui hak manusia sebenarnya adalah kitab suci. Al-Qur'ān banyak memberikan pandangan mengenai kedudukan dan keberadaan wanita. Ayat-ayat yang membicarakan tentang Ādam dan Hawā' dan berbagai hal yang berkaitan dengan keduanya hingga kisah tentang keluarnya mereka ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*ḍamīr muthanna*), seperti kata *humā*. Keduanya memanfaatkan fasilitas surga (al-Baqarah; 35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (al-A'rāf; 20), memakan buah khuldi secara bersama-sama dan menerima akibat terbuang ke bumi (al-A'rāf; 22), serta sama-sama memohon ampun dan sama-sama pula diampuni Tuhan (al-A'rāf; 23). Setelah di bumi, antara satu dengan yang lain saling melengkapi (al-Baqarah; 187).

Al-Qur'ān tidak menganut paham *the second sex*, yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Pria dan wanita dari suku bangsa

manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *‘ābid* dan *khalīfah*. Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas pribadi tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin. Pernyataan ini dijustifikasi oleh firman Allāh dalam surat al-Hujurāt ayat 13. Firman Allāh ini memberikan dasar yang kokoh bagi terciptanya perdamaian dunia serta memberikan *impulse* bagi semua insan untuk berkompetisi dalam kebaikan, dengan kompensasi janji Tuhan bahwa mereka yang paling bertakwa akan mendapat kemuliaan di sisi Tuhan, bukan faktor *gender* atau kesukuan. Ayat tersebut juga menggambarkan sosok ideal wanita muslim sebagai wanita yang memiliki kemerdekaan dan kemandirian, termasuk di bidang politik.

Dalam al-Qur’ān digambarkan satu sosok ratu Bulqis yang mempunyai kerajaan ‘super power’ (*‘arsh ‘azīm*).⁶ Uraian tentang ratu ini disebutkan dalam al-Qur’ān surat al-Naml ayat 23, yang artinya: “Sesungguhnya aku menemui seorang wanita yang memerintah mereka. Dia diberi segala sesuatu dan mempunyai singgasana besar.”⁷ Wanita itu ialah ratu Bulqis; sedangkan kerajaannya bernama Saba’iyah di zaman Nabī Sulaymān.

Dalam beberapa riwayat, juga diceritakan betapa kaum wanita di permulaan Islam memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Isteri nabī, terutama ‘Ā’ishah, telah menjalankan peran politik penting. Ini terjadi pada saat ‘Ā’ishah berusia 42 tahun. Ia terjun ke kancah pertempuran sebagai pimpinan sebuah pasukan yang menentang keabsahan khalifah keempat, ‘Alī b. Abī Ṭālib. Peperangan ini terjadi di Baṣrah pada 4 Desember 656 M. Peranan ‘Ā’ishah dalam perang tersebut merupakan bukti keterlibatan paling nyata wanita dalam kehidupan politik.⁸

‘Ā’ishah telah memainkan peranan kunci dalam kehidupan dua khalifah yang pertama. Ia memberikan andil dalam mengguncang khalifah ketiga, ‘Uthmān, dengan menolak membantunya ketika ia dikepung oleh para pemberontak di rumahnya sendiri. Demikian juga terhadap ‘Alī, khalifah keempat, ‘Ā’ishah memberikan andil cukup besar bagi kejatuhannya dengan cara memimpin pasukan pemberontak untuk

⁶ Hadiyeh Salim, *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 53

⁷ Al-Qur’ān, 27; 23.

⁸ D.A. Spellberg, *Politics, Gender, and The Islamic Past, The Legacy of A’isha bin Abi Bakr* (New York: Columbia University Press, 1994), 151.

menentang keabsahannya. Para sejarawan menyebut pertempuran ini dengan Perang Unta, merujuk kepada unta yang dikendarai 'Ā'ishah.⁹

Meskipun fakta sejarah keterlibatan 'Ā'ishah di kancah politik benar-benar terjadi, tidak sedikit tokoh muslim yang menolak, bahkan menegaskan bahwa wanita tidak pernah ada dalam sejarah politik Islam. Muḥammad b. 'Abd. Allāh b. Sulaymān 'Arafa, dalam bukunya berjudul *Huquq al-Mar'ah fī al-Islām*, menyatakan bahwa wanita tidak memiliki hak-hak politik. Lebih lanjut, ia menulis:

"Sejak permulaan Islam, kaum wanita tidak memainkan peranan dalam masalah-masalah umum di samping semua hak yang telah diberikan Islam kepada mereka, yang seringkali sama dengan hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Ketika para sahabat bermusyawarah setelah wafatnya rasul Allāh untuk memilih pengganti (khalifah) pada pertemuan yang dikenal dengan 'Pertemuan Rumah Banī Sa'īdah', tidak satu pun wanita yang disebutkan ikut ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Kita tidak memiliki bukti keterlibatan mereka dalam pemilihan tiga al-khulafā' al-rāshidūn. Dalam sejarah Islam tidak disebutkan adanya peran serta kaum wanita sejajar dengan kaum pria dalam mengatur urusan negara, baik dalam pembuatan keputusan politis maupun dalam perencanaan strategis.¹⁰

Memahami kasus 'Ā'ishah yang memimpin Perang Unta, 'Arafa cenderung menganggap bahwa hal itu merupakan tindakan 'Ā'ishah secara pribadi yang tidak dapat dijadikan legitimasi untuk membenarkan peranan kaum wanita dalam politik. Bahkan, tindakan 'Ā'ishah ini dianggap sebagai bid'ah.¹¹

Kritik tajam juga dilontarkan Sa'īd al-Afghānī. Menurutnya, gara-gara 'Ā'ishah campur tangan dalam urusan politik, ribuan darah kaum muslim tumpah, ribuan sahabat rasul Allāh terbunuh, dan para pemimpin terkemuka kehilangan nyawa.¹² 'Ā'ishah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pertumpahan darah pada Perang Unta yang telah menyebabkan terpecahnya dunia muslim ke dalam dua friksi, Sunnī dan Shī'ī, tetapi juga terhadap berbagai kerugian yang diderita pengikutnya. Al-Afghānī yakin, seandainya 'Ā'ishah tidak turut campur dalam sejumlah urusan umum

⁹ Ibid., 154.

¹⁰ Muḥammad b. 'Abd. Allāh b. Sulaymān 'Arafa, *Huquq al-Mar'ah fī al-Islām*, cet. III (Kairo: al-Maktab al-Islāmī, 1980), 149.

¹¹ Ibid., 150.

¹² Sa'īd al-Afghani, *'Ā'ishah wa al-Siyāsah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 42.

negara Islam, sejarah muslim pasti akan melalui jalan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran.¹³

Gencarnya sikap apriori para tokoh muslim terhadap keterlibatan wanita dalam politik memunculkan keheranan mengenai asal sumber sejarah yang mereka ambil sehingga bisa menyimpulkan bahwa 'Ā'ishah telah bersalah. Padahal, menurut kesaksian orang-orang sezamannya, 'Ā'ishah merupakan sosok wanita yang tidak memiliki tandingan dan tetap dihormati di kalangan komunitas Sunnī. Selain itu, kasus yang dialami 'Ā'ishah juga digeneralisasi sebagai kasus wanita muslim dunia. Sikap demikian menghapus hak politik jutaan warga negara wanita.

Sebenarnya, 'Ā'ishah hanyalah satu di antara sejumlah wanita di zaman rasūl Allāh yang terlibat dalam politik. Ada sederet nama wanita yang terlibat, misalnya, Ummu Salāmah (isteri nabī), Sāfiyah, Laylā al Ghaffariyah, Ummu Sinān al-Aslamīyah, 'Ātiqa binti Yazīd b. Mu'āwiyah, Ummu Salāmah binti Ya'qūb, dan al-Khayzarān binti Atak.¹⁴ Pada generasi selanjutnya, juga bermunculan sejumlah wanita muslim yang sukses mengendalikan pemerintahan dan hampir terlupakan, di antaranya, Sultānah Rāḍiyah binti Shams al-Dīn Iltumisy, tokoh wanita muslim Turki, Tirkan Khatun dari Saljūk, Shajarat al-Dūr, tokoh wanita Mesir, Sultānah Khādījah dari kepulauan Hindia, Asmā' binti Shihāb al-Sulayhīyah dari dinasti Shī'ah Yaman.¹⁵ Dengan demikian, tidaklah benar jika ada anggapan bahwa wanita dan politik adalah dua hal yang berlawanan. Hal ini karena sejumlah firman Allāh sendiri telah menjelaskan hak wanita dalam politik sebagaimana beberapa ayat di muka.

Kondisi Umum Wanita Muslim di Partai Politik

Wanita yang bergabung di PKB, sebagian besar, berlatar belakang organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama' seperti Muslimat, Fatayat, dan IPPNU, sedangkan wanita muslim di PBB *background* organisasinya rata-rata dari organisasi Muhammadiyah seperti A'isyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah. Demikian halnya wanita muslim di PAN, mayoritas berlatar belakang ormas Muhammadiyah, khususnya A'isyiyah. Berbeda dari ketiga organisasi politik di atas, wanita muslim di PPP lebih

¹³ Ibid., 46.

¹⁴ Ibrāhīm Daqūqī, *al-Nisā' al-Hakīmah fī al-Tārīkh* (Baghdād: Maṭba'at al-Sa'dūn, 1973), 154.

¹⁵ Fatima Mernisi, *The Forgotten Queens of Islam* (tt.: Polity Press, 1993), 52-76.

beragam *background* organisasinya. Unsur Nahdlatul Ulama', Muslimin Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah mewarnai dinamika organisasi ini.

Wanita muslim yang aktif di parpol, rata-rata, terlibat di kepengurusan yang membawahi bidang kewanitaan. Di PKB, misalnya, prosentase mereka yang menjadi pengurus Biro Pengembangan Sumber Daya Perempuan lebih besar daripada di biro-biro lainnya. Hal yang sama juga terjadi di PBB. Sebesar mereka aktif di Muslimat, organisasi semi otonom di PBB yang diprioritaskan bagi wanita. Di PAN, kebanyakan wanita muslim juga menjadi pengurus di Departemen Pemberdayaan Perempuan. Demikian pula di PPP, kondisinya tidak berbeda dengan di ketiga partai tersebut; sebagian besar wanita muslim aktif di lembaga semi otonom organisasi partai tersebut, Lembaga Wanita Persatuan.

Jumlah total wanita muslim dari sampel penelitian yang duduk di legislatif sebanyak lima orang. Jumlah itu tidak mewakili keempat partai dimaksud, melainkan hanya mempresentasikan dua partai, dan itu pun tidak berimbang. Kelima anggota legislatif itu terdiri dari empat orang dari PKB dan satu dari PAN. Anggota legislatif dari PKB itu terpencar di komisi A, B, D, dan E, sedangkan satu dari PAN di komisi E. Adapun dua partai lainnya, PBB dan PPP, untuk periode ini tidak memiliki wakil di jajaran legislatif.

Secara umum, jumlah wanita muslim yang terakomodasi di kepengurusan PKB, PBB, PAN, dan PPP di Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur masih sangat jauh di bawah standar proporsional jumlah wanita sebagai konstituen terbesar. Di PKB misalnya, dari jumlah total pengurus DPW sebanyak 154 orang, wanitanya hanya 16 orang, dan selebihnya pria. Sementara itu, di PAN, dari jumlah keseluruhan pengurus DPW Jawa Timur sebanyak 218, jumlah wanitanya hanya 23 orang dan sisanya pria. Prosentase yang kecil ini terjadi juga di PBB dan PPP. Posisi penting (pengurus harian) partai hampir tidak ada yang dijabat wanita. Masing-masing partai hanya diwakili dua orang sebagai pengurus harian yang mengendalikan bidang kewanitaan, sebagai wakil ketua dan wakil sekretaris.

Minimnya jumlah wanita yang terakomodasi di sejumlah partai ini memunculkan beberapa kemungkinan penyebab. *Pertama*, minimnya jumlah wanita yang tertarik dengan dunia politik. *Kedua*, kondisi tersebut sengaja diciptakan laki-laki yang merasa lebih superior dan berkualitas dibanding wanita. *Ketiga*, adanya pemahaman yang salah, baik di

kalangan wanita maupun pria, tentang keterlibatan wanita di politik. Anggapan yang berkembang di kelompok ketiga ini umumnya menunjuk bahwa wanita dalam politik merupakan sesuatu yang berlawanan dan tidak dimungkinkan, bahkan haram hukumnya.

Dari sisi usia, wanita muslim yang aktif di partai politik sangat variatif. Masing-masing dengan prosentase yang berbeda. Di PKB, aktifis wanita berusia 36-45 tahun sebanyak 50%, di PBB dengan usia 25-35 tahun sebanyak 50%, di PAN dengan usia 36-45 tahun sebesar 37,5%, dan di PPP sebagian besar berusia 46-55 tahun (75%). Terjadinya perbedaan usia di masing-masing partai itu karena untuk aktif di politik, memang, tidak ada pembatasan usia minimal dan maksimal.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagai salah satu penentu tingkat partisipasi politik, diketahui bahwa wanita muslim di empat partai ini rata-rata lulusan perguruan tinggi. Prosentasenya, PKB sebanyak 50%, PBB 75%, PAN 52,5%, dan PPP 52,5%. Adapun status perkawinan wanita muslim dari tiga partai (PKB, PAN, PPP), kebanyakan mereka sudah berkeluarga. Hanya di PBB jumlah yang menikah dan belum menikah seimbang. Kondisi ini merujuk pada tingkat usia wanita muslim yang bergabung di PBB; sebagian mereka para muda yang masih berusia 25-35 tahun. Namun demikian, yang perlu dicatat bahwa *sense of politics* wanita tidak ditentukan oleh status perkawinan mereka, melainkan lebih oleh faktor kemauan, kemampuan, dan kesempatan politik.

Di samping aktif berpolitik, wanita muslim di atas juga masih menyibukkan diri di luar kegiatan politiknya untuk bekerja. Tercatat, jumlah wanita muslim PKB yang berwiraswasta sebanyak 37,5%, sebagai pegawai swasta 37,5%, dan 25% lainnya menjawab lain-lain tanpa menyebutkan secara spesifik jenis pekerjaannya. Adapun wanita muslim PBB, sebanyak 37,5% berwiraswasta, 37,5% menjawab lain-lain, 12,5% menganggur, dan 12,5% sebagai pegawai swasta. Sementara itu, sebagian besar wanita muslim di PAN berwiraswasta dengan jumlah prosentase 62,5%, sisanya sebanyak 12,5% berprofesi sebagai pedagang, dan 25% berikutnya tidak bekerja. Tidak jauh berbeda dengan kondisi di beberapa partai tersebut, jenis pekerjaan wanita muslim di PPP beragam; 25% pegawai swasta, 12,5% berwiraswasta, 50% menjawab lain-lain, dan 12,5% sisanya tidak bekerja.

Adapun dari sisi penghasilan, juga terlihat bahwa pendapatan mereka bervariasi. Di PKB, aktifis wanita muslim mendapatkan penghasilan rata-rata sehari di atas Rp. 50.000. Kondisi tersebut menduduki prosentase

terbesar. Demikian juga wanita muslim di PAN, penghasilan mereka rata-rata sehari Rp. 50.000 ke atas. Sementara wanita muslim di PBB dan PPP, rata-rata (50%) berpenghasilan antara Rp. 10.000 - Rp. 30.000. Dengan rincian jumlah penghasilan sebagaimana tercantum tadi, diketahui bahwa mereka bukanlah wanita yang hidup berkekurangan atau terlalu berlebihan. Meskipun ada yang berpenghasilan antara Rp. 10.000 - Rp. 30.000, mereka masih bisa tetap aktif bekerja untuk organisasinya. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki *sense of politics* yang kuat.

Di samping penghasilan, pemilikan barang berharga juga bisa dijadikan sebagai ukuran tingkat ekonomi mereka. Dari data di lapangan, tampak bahwa jumlah wanita muslim PKB yang memiliki mobil sebanyak 62,5%, PBB 25%, PAN 75%, dan PPP 75%. Responden dari PKB yang memiliki sepeda motor 75%, PBB 50%, PAN 62,5%, dan PPP 87,5%. Mengenai barang berharga seperti televisi, tape recorder, dan radio, seluruh responden (100%) dari seluruh partai memilikinya. Untuk barang berharga berupa komputer, dari PKB hanya 25% yang menyatakan memiliki, PBB 12,5%, PAN 75%, dan PPP 75%.

Dari paparan keseluruhan tentang tingkat ekonomi wanita muslim, terlihat bahwa wanita-wanita muslim yang bergabung di partai bukan wanita yang aktif tanpa modal, akan tetapi keaktifan mereka di partai disertai modal yang cukup. Paparan ini menjadi penting artinya bagi wacana partisipasi wanita dalam politik karena tanpa memiliki modal, kemungkinan untuk dapat aktif secara maksimal sangat kecil. Hal ini karena di partai tidak ada sistem penggajian sebagaimana layaknya pegawai. Maka, untuk bisa aktif di rapat internal maupun eksternal organisasi, seorang aktifis wanita harus mempunyai anggaran ekstra di samping kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Tujuan Partisipasi Politik Wanita Muslim

Tujuan partisipasi politik wanita muslim di PKB dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, untuk memberdayakan wanita lewat politik, sekaligus membuktikan bahwa wanita juga mampu berpolitik. Motivasi ini dilandasi oleh kesadaran terhadap posisi wanita yang kerap terpinggirkan oleh laki-laki. *Kedua*, untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang proporsional tentang status wanita dalam politik. *Ketiga*, tidak direncanakan. Maksudnya, ada sebagian kecil wanita muslim PKB yang aktif, bukan atas kesadaran pribadi, namun semata-mata karena lingkungan yang mendorongnya untuk aktif di politik.

Sementara itu, semangat menjalankan syi'ar Islam menjadi prioritas utama bagi keterlibatan wanita muslim PBB. Tujuan lainnya tidak beda dengan wanita muslim PKB; mereka ingin meningkatkan harkat dan martabat wanita melalui politik. Ada juga sebagian kecil wanita muslim di partai ini yang terlibat dalam aktivisme partai bukan atas kemauan pribadi, akan tetapi karena keadaan memaksa untuk aktif di parpol. Sebagian lainnya terlibat di partai karena ketertarikannya dengan program PBB yang bernuansa Islami.

Tujuan partisipasi politik wanita muslim PAN dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, sebagai rasa simpati yang mendalam terhadap sosok reformis, Amien Rais. *Kedua*, terpenggil untuk mengoptimalkan peran wanita dengan mendobrak budaya patriarki yang telah menghambat ruang gerak wanita di berbagai lini kehidupan. *Ketiga*, sebagai perwujudan dari keinginan yang kuat untuk membuktikan kepada publik bahwa wanita juga memiliki potensi dan sumberdaya yang berkualitas untuk dapat berdampingan dengan laki-laki dalam berbagai hal.

Di PPP, partisipasi politik wanita muslim dilakukan di antaranya karena keinginan mereka untuk dapat mengekspresikan kemampuannya lewat politik. Ada juga yang terpenggil untuk melanjutkan misi dakwah yang pernah digelutinya sebelum aktif di politik. Sebagian lainnya karena keadaan yang memaksanya untuk terlibat politik, misalnya karena suami mereka aktifis partai sehingga, sebagai konsekwensinya, mereka juga harus masuk partai.

Yang patut dicatat, dari beberapa tujuan partisipasi di atas, sebenarnya, wanita muslim PKB, PBB, PAN, dan PPP memiliki tujuan yang sama, ingin memaksimalkan fungsi dan peran wanita untuk dapat berkembang melalui wadah politik. Hanya saja, wadah ekspresi mereka berbeda-beda. Ada yang melalui PKB karena *basic* organisasi mereka dari NU, PAN karena mereka dari keluarga besar Muhammadiyah, PBB karena keinginan mereka melanjutkan misi perjuangan Masyumi, dan PPP karena partai ini telah digeluti sejak lama sebelum lahirnya multipartai.

Partisipasi Politik Wanita Muslim

Ada tiga indikator untuk mengukur partisipasi politik wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP. *Pertama*, partisipasi dalam pemilihan umum. *Kedua*, partisipasi internal organisasi. *Ketiga*, partisipasi eksternal organisasi. Partisipasi dalam Pemilu menyangkut beberapa aspek, mulai

dari pemberian suara dalam Pemilu, keikutsertaan dalam kampanye, sampai kesediaan membantu memasang atribut partai menjelang Pemilu.

Pemilu sebagai sarana masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin bangsa telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan itu terkait dengan siapa saja yang berhak memilih, kapan dan dimana, serta bagaimana keadaannya. Dari paparan data tentang usia wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP, diketahui bahwa tingkat usia mereka tergolong usia berhak memberikan suara dalam Pemilu. Hasil yang diperoleh, 100% responden dari PKB menyatakan sering memberikan hak suara, PBB 87,5%, PAN 100%, dan PPP 100%. Di PBB, terdapat 12,5% responden yang menyatakan kadang-kadang memberikan suaranya di Pemilu. Hal ini karena usia responden yang relatif muda sehingga baru beberapa kali responden tersebut memiliki hak mencoblos dalam Pemilu.

Terkait dengan persoalan keikutsertaan dalam kampanye Pemilu, diperoleh gambaran bahwa responden yang menjawab sering beragam antara satu partai dengan lainnya; di PKB 75%, PBB 50%, PAN 100%, dan PPP 100%. Partisipasi dalam kampanye pada wanita muslim di empat partai tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita muslim di PAN dan PPP lebih baik daripada PKB dan PBB. Kewajiban nyata bagi wanita yang terjun dalam politik adalah melakukan persuasi, atau bahkan provokasi, terhadap warga masyarakat untuk mencoblos partai pilihannya karena ia memiliki tanggung jawab untuk memenangkan partainya. Meskipun tidak harus menjadi juru kampanye formal, mempengaruhi orang lain untuk mencoblos dapat dilakukan secara informal maupun nonformal, misalnya ketika bertemu dengan warga di jalan, pasar, atau tempat-tempat lainnya yang kebetulan tidak menjadi ajang kampanye.

Kegiatan mempengaruhi warga masyarakat untuk mencoblos partainya sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh wanita muslim secara tidak sama frekuensinya. Di PKB, terdapat 75% dari responden yang menyatakan sering melakukan, PBB 75%, PAN dan PPP 100%. Hasil ini menunjukkan tingkat partisipasi wanita muslim di PAN dan PBB dalam hubungannya dengan upaya memperbesar perolehan suara lebih baik dari PKB dan PBB. Selain itu, pada kegiatan pemasangan atribut partai (tanda gambar, poster, stiker, dan sebagainya) menjelang pemilu, sebanyak 50% wanita muslim PKB menyatakan sering, 25% kadang-kadang, dan 25% sisanya, bahkan, tidak pernah. Kondisi yang sama juga dialami PAN; sebanyak 50% menyatakan sering, 25% kadang-kadang, dan 25% tidak pernah. Jumlah yang berimbang, justru, terjadi di wanita muslim PBB;

yang menyatakan sering dan kadang-kadang sama-sama 50%. Adapun di PPP, yang menyatakan sering 25%, kadang-kadang 25%, dan tidak pernah 50%.

Khusus mengenai partisipasi dalam internal organisasi, penelitian ini terfokus pada empat poin pertanyaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat keaktifan wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP dalam menghadiri rapat organisasi tergolong tinggi. Pada keempat partai itu, yang menyatakan sering prosentasenya lebih besar daripada yang kadang-kadang maupun tidak pernah. Keterlibatan aktif di internal organisasi itu juga ditunjukkan pada saat rapat. Wanita muslim PKB yang menyatakan sering mengajukan usul sebanyak 62,5%, PBB 50%, PAN 62,5%, dan PPP 62,5%. Usulan yang dinyatakan, salah satunya, tentang jumlah keterwakilan wanita di legislatif yang tidak sebanding dengan jumlah konstituen wanita.

Terhadap keberlangsungan partai dari sisi finansial, wanita muslim rata-rata juga memiliki keterlibatan dan kepedulian yang tinggi. Hasil yang diperoleh menunjukkan sebanyak 62,5% wanita muslim di PKB, PAN, dan PPP menyatakan sering memberi bantuan materiil. Hanya di PBB yang partisipasinya pada tingkat keseringan dimaksud mencapai 25%. Tingkat partisipasi yang rendah pada wanita PBB, berdasarkan data penghasilan mereka, disebabkan oleh sebagian besar mereka wanita muda yang tingkat ekonominya pas-pasan dan statusnya belum berkeluarga.

Pada poin tentang aktivitas mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi, wanita muslim PKB, PBB, PAN, dan PPP menunjukkan tingkat keseringan yang sama, yakni sebanyak 37,5%. Adapun yang menyatakan kadang-kadang terjadi perbedaan; di PKB dan PPP 37,5%, PBB 62,5%, dan PAN 25%. Perbedaan prosentase juga terjadi pada mereka yang menyatakan tidak pernah; di PKB dan PPP 25%, dan PAN 37,5%. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa tingkat independensi wanita muslim dalam menyatakan sikap terhadap pembuatan keputusan di organisasi masih sangat rendah. Prosentase yang menunjukkan tingkat independensi yang tinggi hanya terjadi pada wanita muslim PAN yang memperoleh jumlah 37,5%, sedangkan tingkat independensi terendah adalah wanita muslim PBB.

Untuk mengukur partisipasi di persoalan eksternal organisasi terdapat empat pertanyaan yang diajukan. *Pertama*, tentang tingkat keseringan wanita muslim dalam mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam hal ini, wanita muslim PPP yang melakukan hal itu sebanyak 50%,

PAN 37,5%, PBB 12,5%, dan PKB 25%. Dominannya wanita muslim PPP yang sering mengajukan usul pada pemerintah daripada partai lainnya merupakan kondisi yang wajar karena pada era sebelum multipartai wanita muslim PPP banyak yang sudah menjadi anggota DPRD selama beberapa periode. Lewat sarana lembaga legislatif ini, intensitas bertemu wanita muslim PPP sangat memungkinkan terjadi. Pada kesempatan tersebut, mereka memanfaatkannya untuk mengajukan usul atau masukan kepada pemerintah.

Kedua, tentang frekuensi melakukan pertemuan dengan pejabat sebagai sarana untuk memperjuangkan dan meningkatkan kualitas dan peran sesama wanita. Jumlah wanita muslim PKB dan PPP yang menyatakan sering melakukan hal tersebut sebanyak 50%, sedangkan PBB dan PAN hanya 25%. Tingginya partisipasi wanita muslim PKB dan PPP karena kondisi mereka lebih memungkinkan untuk melakukan pertemuan dengan pejabat. Sebagaimana diketahui, jumlah wanita muslim PKB yang tercatat sebagai anggota legislatif sebanyak 4 orang, dan PPP 10.

Ketiga, tentang upaya yang dilakukan untuk mengajukan dan meloloskan usul kepada pemerintah. 100% wanita muslim PKB, PBB, PAN, dan PPP menyatakan tidak pernah melakukan praktik *money politics*. Sikap ini didasari oleh kesadaran ingin menjalankan praktik politik yang bersih. Di samping itu, identitas sebagai wanita muslim memagari mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama, termasuk penyogokan.

Keempat, tentang praktik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di kalangan wanita muslim PKB dan PBB, 25% menyatakan sering melakukan praktik atau tindakan tersebut, 50% kadang-kadang, dan 25% lainnya tidak pernah. Sementara itu, di PAN dan PPP, mereka yang menyatakan sering 12,5%, kadang-kadang 25%, dan tidak pernah 62,5%. Gambaran ini menunjukkan bahwa bentuk ekspresi dalam merespon kebijakan pemerintah di kalangan wanita muslim tidak terjadi secara sama.

Penutup

Munculnya atmosfir baru dalam wacana perpolitikan nasional memberikan media yang luas terhadap pengembangan kesadaran wanita muslim untuk melakukan aktualisasi potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai muncul dengan semakin besarnya partisipasi mereka dalam

memperjuangkan nasib sesama kaumnya melalui jalur dan instrumen politik yang ada. ❁